

## PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PENERIMA MANFAAT DI PERKOTAAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PASCA COVID 19

Topik Ismail<sup>1\*</sup>, Septiana Dwiputrianti<sup>2</sup>, Nita Nurliawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Balai Besar Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Bandung

<sup>2,3</sup>Politeknik STIA LAN Bandung

\*Corresponding author: [topik.ismaiel@gmail.com](mailto:topik.ismaiel@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: September 02, 2022

Revised: December 16, 2022

Accepted: February 10, 2023

#### Keywords:

Household Welfare;  
Poverty; Nested Spheres of  
Poverty; Program Keluarga  
Harapan.

### ABSTRACT

*The poverty reduction program is still one of the government's priorities, especially since the Covid-19 pandemic. The data shows that many households or communities still need help in meeting basic needs. At the same time, the scope of supporters does not provide opportunities to improve welfare on an ongoing basis or to get out of vulnerability. The study aims to analyze the welfare conditions of poor households in urban areas by bringing them closer to the basic needs and scope of welfare. Supporting environmental information from both internal and external in efforts to reduce poverty. Local governments urgently need this study to support poverty alleviation programs. This study used a survey approach from data from household groups receiving Program Keluarga Harapan assistance in Babakan Ciparay District obtained from e-PKH data since the Covid 19 Pandemic. This data supports conducting a multidimensional analysis of poverty levels in urban areas through Nested Spheres of Poverty (NESP). This study shows that the average beneficiary family living in urban areas shows optimism to prosper, even though they are experiencing a crisis of basic needs and spheres of well-being. Recommendations are given the need to improve the evaluation of the welfare of beneficiary households, to be more effective and sustainable by bringing multidimensional closer to look at various aspects of subjectivity and objectivity, basic needs, such as Education; Health; standard of living; and the scope of welfare with the Sustainable Livelihoods approach.*

### PENDAHULUAN

Ide dasar dari suatu pembangunan bertujuan untuk menaikkan kualitas atau kepuasan hidup. Untuk menilai dampak proyek pembangunan dalam

pengentasan kemiskinan sangat penting menggunakan metode pengukuran kesejahteraan. Fakta secara umum, mengukur kesejahteraan menitik

beratkan pada pendapatan dan konsumsi dibandingkan dengan garis kemiskinan. Namun, ukuran ini dikritik karena mengabaikan aspek kemiskinan non-moneter (Ravindra Deyshappriya & Minuwanthi, 2020); Takeshi, 2018). Apabila kemiskinan dilihat secara menyeluruh maka tidak aman untuk mengandalkan pada satu ukuran kemiskinan dan tidak secara akurat mewakili deprivasi non-moneter dalam mengidentifikasi orang miskin. Sebab, kemiskinan terdiri dari banyak hal yang saling terkait, yakni kekurangan sumber daya material/pendapatan dan kekurangan kemampuan (Kuhumab, 2018; Su et al., 2021). Meskipun pengurangan kemiskinan pendapatan juga menunjukkan penurunan dalam indikator lainnya (Alkire et al., 2015). Mungkin ada indikator lain yang dapat diidentifikasi yang sangat terkait dengan deprivasi dalam dimensi non-moneter lainnya. Luasnya dimensi yang mencirikan kesejahteraan membuat sulit untuk diukur sehingga ada tantangan lebih lanjut untuk mengintegrasikan langkah-langkah kesejahteraan ke dalam pemodelan kebijakan dan menghubungkan dengan analisis ekonomi makro (Alkire, 2015). Langkah preferensi dalam kebijakan pengukuran kesejahteraan non-moneter mengacu kepada kapabilitas (Alkire, 2015; Kuhumab, 2018), dan kesejahteraan

subjektif (Alatartseva & Barysheva, 2015; Cummins, 2018; Dolan et al., 2011; Khomaini, 2020; Nugroho et al., 2022; Rojas, 2014; Takeshi, 2018). Ini untuk mempertimbangkan tujuan utama kebijakan seperti progress pemantauan, menginformasikan desain dan penilaian kebijakan (Dolan et al., 2011).

Ada saran kebijakan dari hasil ukuran dan pemantauan kemiskinan melalui moneter dan non-moneter untuk mengetahui kendala kesejahteraan masyarakat bersifat lokal. Misalnya Gonner (2007) melakukan studi ukur dalam pemantauan kemiskinan di Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan mendekati kesejahteraan subjektif, kemiskinan multidimensi dan aksesibilitas layanan. Kesimpulannya adalah konsep yang diterapkan dapat mudah disesuaikan dengan kondisi setempat/lokal dibandingkan dengan indikator kemiskinan nasional. Sebagai contoh, suatu daerah mempunyai komoditas dan karakteristik yang berbeda di tiap daerah lainnya. Ini dapat menggambarkan tentang kelemahan yang dianggap kritis, moderat dan baik dalam melihat kemiskinan dan kesejahteraan karena masing-masing indikator saling terkait satu sama lain. Hal ini dapat digambarkan apabila seseorang mengalami kekurangan dalam layanan dasar/multidimensi

maka dapat mengarah kepada deprivasi akses sosial, ekonomi, layanan publik dan dapat mempengaruhi kualitas hidup. Ada hubungan antara kesejahteraan subjektif dengan pendapatan yang menunjukkan hubungan positif (Alatartseva & Barysheva, 2015; Alkire, 2015; Hadna & Askar, 2022; Martínez & Maia, 2018; McGuire et al., 2022; Rojas, 2014; Takeshi, 2018).

Kesejahteraan subjektif merupakan penilaian subjektif orang terhadap kualitas hidup dan belum dapat dijelaskan pada ukuran kesejahteraan objektif (Takeshi, 2018). Ada pengaruh dampak pada kesejahteraan subjektif kepada kemiskinan pendapatan, garis kemiskinan dan kemiskinan multidimensi (Takeshi, 2018). Pendapatan yang lebih rendah dapat memperburuk pada kesejahteraan subjektif dan sebaliknya. Namun, pendapatan di bawah garis kemiskinan tidak memiliki pengaruh tambahan setelah ada pengendalian pendapatan. Kemiskinan multidimensi lebih ke sarana untuk menangkap kompleksitas kemiskinan yang mempertimbangkan berbagai dimensi kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, standar hidup (Alkire et al., 2015), dan akses dalam memenuhi lingkup kebutuhan dasar, seperti alam, sosial, ekonomi, infrastruktur dan layanan publik

(Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, W, et al., 2007).

Pendekatan moneter dan non moneter memungkinkan dalam mengukur kesejahteraan minimum dalam melaksanakan program bantuan tunai bersyarat (BTB). BTB dipandang sebagai cara yang efektif dalam investasi pembangunan manusia melalui komitmen untuk memberdayakan diri dan menciptakan generasi di masa depan dan BTB menjadi alat kebijakan yang tepat di masa pandemi (Braun & Ikeda, 2020). Di beberapa negara berkembang mendekati BTB untuk pengentasan kemiskinan dan hasil program telah menaikkan kesejahteraan masyarakat miskin serta berdampak positif sesuai tujuan program itu sendiri. Namun terlepas dari kesuksesan tersebut, BTB memiliki dampak yang berbeda pada dimensi non-moneter (kesejahteraan subjektif) (Martínez & Maia, 2018). Dalam kasus bantuan tunai, diperoleh pandangan yang beragam dari penerima manfaat kaitan uang yang diterima (Kalama et al., 2021). Misalnya program MFA di Kolombia mengkonfirmasi tidak memiliki pengaruh terhadap jaringan sosial dan komunitas atau persepsi tentang kondisi kehidupan keluarga penerima manfaat (Martínez & Maia, 2018), di Meksiko penerima manfaat di perkotaan

mengalami *opportunity cost* (Behrman et al., 2012). Penerima manfaat program BRIM/BSH di Malaysia menyampaikan bahwa bantuan tunai tidak mempengaruhi pendapatan rumah tangga secara besar-besaran karena hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang yang tinggal di daerah perkotaan (Kalama et al., 2021). Kasus di Indonesia terdapat catatan dalam program BTB, yaitu sejauh ini belum ada pengaruhnya terhadap distribusi pengeluaran konsumsi bagi sasaran yang berada di kuantil terendah (Hadna & Askar, 2022). Ini mengarah kepada penjelasan kemiskinan sebagai akibat dari kurangnya sumber daya, keterampilan, kebebasan dan pilihan untuk masa depan yang lebih baik (Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, W, et al., 2007).

Sebagaimana respon penerima bantuan di Malaysia, Meksiko, Indonesia dan Kolombia yang merupakan berbagai aspek fundamental kehidupan penerima bantuan dalam kesejahteraan. Artinya, kondisi ini juga menggambarkan kemiskinan dengan cara yang sangat subjektif, didorong oleh perasaan kekurangan, ketidakmampuan dan kerentanan. Apalagi wabah virus COVID-19 melanda dunia, jutaan orang terinfeksi COVID-19 dan meningkatkan estimasi

dampak pandemi terhadap kemiskinan global. Di Indonesia, jumlah orang berisiko COVID-19 mempunyai korelasi dengan jumlah orang miskin multidimensi di suatu provinsi (Thaariq et al., 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan ukuran kesejahteraan kembali dalam penentuan target sasaran, calon penerima, pemantauan dalam pelaksanaan dan *exit* program. Pelaksanaan ini mengarahkan manfaat kepada masyarakat miskin atau rentan dari program yang merupakan fitur penting dari BTB yang ditinjau (Rossel et al., 2019).

Ada beberapa alasan pendekatan moneter dan non moneter dalam mengukur kemiskinan dan kesejahteraan pada BTB, di antaranya perbedaan karakteristik wilayah di Indonesia baik perkotaan atau pedesaan. Secara subjektif, perkotaan meningkatkan pada kebahagiaan dan kepuasan dibandingkan pedesaan yang hanya meningkatkan kebahagiaan dalam modal sosial (Nugroho et al., 2022). Alasan utama adalah modal sosial di perkotaan memiliki asosiasi manajemen dan infrastruktur dengan masyarakat ketimbang di pedesaan, seperti ketersediaan fasilitas sarana prasarana dan infrastruktur. Namun, akan berbeda jika rumah tangga yang kondisi sosial ekonominya rendah yang dapat mempengaruhi kualitas hidup

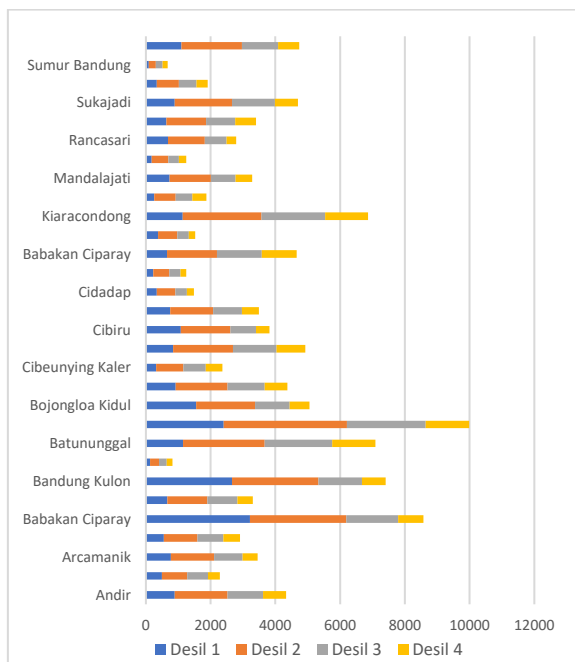
(Diener, 1984; Diener et al., 1993; Diener & Ryan, 2015; Muhammed & Abubakar, 2020). Hal ini terkait penyebab faktor kemiskinan perkotaan (Rukumnuaykit, 2015). Melihat hal itu, penggunaan konsep dan model multidimensi dapat diadaptasi secara lokal untuk mengukur dan memantau kemiskinan (Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, W, et al., 2007). Pendekatan multidimensi untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang secara eksplisit mempertimbangkan berbagai tujuan BTB (*conditional cash transfer*) dan berbagai kekurangan rumah tangga miskin (Azevedo & Robles, 2013). Sebab, pada dasarnya program CCT menggabungkan redistribusi dan tujuan struktural (Azevedo & Robles, 2013; Martínez & Maia, 2018).

Kaitan BTB, dalam hal ini PKH, ada beberapa hal yang diperoleh bagi penerima manfaat. Pertama penerima manfaat yang *exit* program kemungkinan dapat kembali ke kondisi sebelum menjadi peserta program (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Ini dilatarbelakangi 7% rumah tangga berada di desil 1 memiliki alasan karena menganggap keluarga lain lebih membutuhkan program dan penerima yang *exit* dari program tanpa adanya ekonomi inklusif (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Kedua penerima manfaat yang aktif dapat dihadapkan

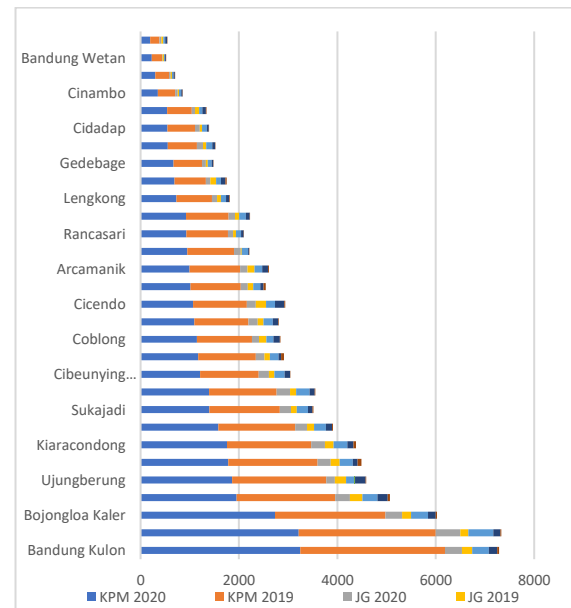
dengan tantangan pada preferensi dan akses yang berbeda terhadap sumber daya (Chiappori & Meghir, 2014) yang dapat mengakibatkan *opportunity cost* dan masih terdapat peserta PKH berada di atas garis kemiskinan (Sembiring, 2022). Apalagi penerima bantuan merupakan pekerja di sektor informal, mereka paling berdampak di era COVID-19 (Hastuti et al., 2020). Gambaran kedua kasus tersebut yang kemungkinan menggambarkan jumlah graduasi PKH. Sebab, jumlah graduasi mandiri lebih sedikit ketimbang graduasi alamiah, yakni 837.531 secara alamiah dan graduasi mandiri sebanyak 341.773 (Syamsulhakim & Khadijah, 2021).

Perbandingan jumlah graduasi mandiri dan alamiah memberikan gambaran pada kemampuan pemutakhiran data sosial ekonomi terkait: kesulitan penilaian secara objektif, penilaian subjektif oleh Pendamping PKH, penilaian masyarakat atau penerima bantuan secara sukarela melepas/*exit* dari program serta merasa enggan untuk melepas bantuan (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Tentunya, untuk mengetahui kondisi kesejahteraan rumah tangga perlu dilihat kembali tingkat kesejahteraan penerima bantuan PKH. Hal ini berkaitan dengan sebagian besar ukuran kesejahteraan empiris

terhenti di tingkat rumah tangga (Chiappori, 2016). Apalagi fokus yang berkembang dalam literatur tentang evaluasi dampak program anti kemiskinan ditempatkan kembali pada pendekatan penghitungan (Levine et al., 2012). Oleh karena itu, pentingnya melihat kesejahteraan guna menjawab permasalahan graduasi mandiri dan mengetahui deprivasi kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat PKH secara multidimensi.



Gambar 1. Tingkat Kesejahteraan Terendah Kota Bandung



Gambar 2. Jumlah KPM, Jumlah Graduasi Kota Bandung

Keterangan:

KPM = Keluarga Penerima Manfaat

JG = Jumlah Graduasi

Berbagai penelitian PKH telah dilakukan, seperti PKH berjalan efektif (Cahyadi et al., 2020; World Bank, 2011), dampak program pada kesehatan, pendidikan, modal manusia (Cahyadi et al., 2020), pentingnya resertifikasi/graduasi KPM PKH (Puteri, 2021), dan graduasi KPM PKH (Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Namun studi pengukuran kesejahteraan keluarga penerima manfaat dalam pemantauan Program Keluarga Harapan perkotaan belum dilakukan secara moneter dan non-moneter, baik dari kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif. Indikator kesejahteraan subjektif dapat berkontribusi dalam studi kesejahteraan

dan kemiskinan selain indikator sosial ekonomi (Rojas, 2014). Hal ini menjadi dasar perlunya penelitian yang memberikan penjelasan secara lebih mendalam mengenai kesejahteraan sebagai penerima manfaat PKH perkotaan, khususnya di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Alasan dasar pemilihan Kecamatan Babakan Ciparay memiliki jumlah rumah tangga yang berada di desil satu tertinggi di Kota Bandung (12.35%) dibandingkan dengan kecamatan lain (Gambar 1). Kecamatan Babakan Ciparay memiliki jumlah penerima manfaat PKH sebanyak 3211 dengan jumlah kedua tertinggi setelah Kecamatan Bandung Kulon. Selain itu, jumlah graduasi

tertinggi di Kota Bandung meskipun yang terjadi graduasi secara alamiah, jumlah graduasi di tahun 2020 sebanyak 502 secara alamiah sementara graduasi mandiri nol penerima (gambar 2). Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah penerima bantuan terbesar di Indonesia dan masyarakat miskin terbanyak kedua di Indonesia, yakni berjumlah 4.188.520 jiwa. Jawa Barat mendapat bantuan PKH hampir 40.2% dari penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengarah kepada ketimpangan atau distribusi pendapatan antar penduduk sebesar 0.403 dengan pendapatan per kapita per bulan per orang sebesar 421.757 baik di pedesaan maupun 428.832 di perkotaan

Tabel 1. Total Keluarga Penerima Manfaat, Masyarakat Miskin, Gini Rasio dan Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

No	PROVINSI	KPM	Penduduk Miskin (Sept 2020)	Gini rasio (Mar 2020)	Garis Kemiskinan	
		2021			Pedesaan (Mar 2021)	Perkotaan (Mar 2021)
1	JAWA BARAT	1,685,066	4,188,520	0.403	421,757	428,832

Data sekunder, diolah penulis

Berdasar jenis graduasi, Kecamatan Babakan Ciparay melalui graduasi alamiah maka dapat dipastikan rumah tangga yang *exit* program dapat kembali miskin apabila tanpa melihat kembali ukuran kesejahteraan penerima program. Hal senada terkait adanya asosiasi faktor kesejahteraan yang membentuk subjektifitas penerima

bantuan BTB di Kecamatan Babakan Ciparay (Ismail et al., 2022). Selain itu, Kecamatan Babakan Ciparay berada di perkotaan, memiliki fasilitas dan akses yang mudah ke sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur bagi masyarakat yang tinggal serta belum mengalami banjir/kekeringan/angin besar (BPS Kota Bandung, 2020).

Berdasar dari kelayakan huni tahun 2017 dan 2018 Kecamatan Babakan Ciparay ada kenaikan secara signifikan di tiap indikator. Hal sama terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dalam indeks kebahagiaan yang menunjukkan adanya peningkatan persepsi masyarakat di Kecamatan Babakan Ciparay Masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay menunjukkan tingkat kebahagiaan (2017: 71.51, 2018: 72.34) meskipun ada penurunan nilai indeks per tahunnya di pekerjaan (2017: 70.26, 2018: 69.70), lingkungan (2018: 74.85, 2017: 75.76), keamanan (2018: 72.20, 2017: 77.88), Keharmonisan keluarga (2018: 76.59, 2017: 77.53), hubungan sosial (2018:72.57, 2017: 73.25) dan ketersediaan waktu luang (2018: 69.27, 2017: 72.37). Oleh karena itu, melihat latar belakang tersebut maka perlu dilakukan analisis ukuran kesejahteraan penerima manfaat dengan model moneter dan non moneter. Hasilnya juga dapat digunakan oleh Fasilitator PKH atau lembaga terkait dalam pemantauan kesejahteraan penerima untuk mengetahui kondisi kelemahan kesejahteraan penerima bantuan. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis ukuran kesejahteraan rumah tangga penerima PKH di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan mendekati moneter dan non moneter.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif deskripsi diadopsi dalam penelitian ini karena tujuannya untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Sebanyak 3211 rumah tangga penerima bantuan yang masih aktif dijadikan populasi dengan menggunakan random sampel dalam menentukan sampel. Untuk menggeneralisir dari random sampling dan menghindari kesalahan atau bias, harus memiliki ukuran sampel (Taherdoost, 2020). Formula umum menghitung ukuran sampel dalam survey menggunakan  $n = \frac{(N \cdot X)}{N + N - 1}$  di mana  $X = \frac{(\frac{Z\alpha}{2})^2 \cdot P(1-P)}{MOE^2}$  (Etikan & Babatope, 2019).

Penelitian ini mendeskripsikan dari hasil survey dengan pengolahan data menggunakan *Nested Spheres of Poverty* (NESP). Model NESP digunakan untuk menawarkan dasar komprehensif dalam penilaian kemiskinan dan kesejahteraan multidimensi di tingkat rumah tangga (Gonner et al., 2007). Konsep NESP merupakan model bertingkat dengan berpusat pada kesejahteraan subjektif dikelilingi oleh aspek inti kemiskinan termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan dan lingkungan pendukung: alam, politik, ekonomi, dan sosial



dengan layanan dan sarana (Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, de Jong, et al., 2007).

Penghitungan indeks dilakukan dengan penjumlahan skor yang diperoleh dari hasil jawaban setiap pertanyaan/pertanyaan dalam satu variabel melalui penjumlahan skor minimum dari skala nilai terendah dari pernyataan/pertanyaan dalam satu variabel dan menjumlahkan skor maksimum dari perolehan skala tertinggi atau dengan formulasi = 
$$\frac{(\text{Jumlah skor diperoleh}) - (\text{Jumlah skor min.})}{(\text{Jumlah skor maks.}) - (\text{Jumlah skor min.})} \times 100.$$

Penentuan kesejahteraan rumah tangga menggunakan tiga indikasi, yaitu kritis, moderat dan baik dari hasil pengukuran. Pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 dan Ms. Office Excel versi 2019 dengan mengacu kepada tahapan pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh (Cahyat et al., 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 menjelaskan demografi penerima manfaat PKH di Kecamatan Babakan Ciparay. Data menunjukkan penerima bantuan BTB di Kecamatan Babakan VCiparay masuk di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengarah kepada rata-rata pendapatan masih di bawah satu juta (*mean* 2.20, *SD* 1.328). Mempunyai jumlah anak antara 2 dan 3 anak (*mean* 2.75, *SD* 0.890) yang harus

dirawat dan membiayai sekolah anaknya hampir ke dua-duanya hingga jenjang yang lebih tinggi, masih bertempat tinggal bersama dengan keluarga (*mean* 1.50, *SD* 0.779) lainnya. Sementara penerima manfaat masuk usia produktif, yaitu 41 sampai dengan 50 tahun (*mean* 2.55, *SD* 0.715) dengan pendidikan (*mean* 2.70, *SD* 0.832) mengarah lulusan SMP. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam meraih peluang usaha di wilayah perkotaan, terkecuali mereka memiliki potensi yang dijadikan untuk membentuk atau mengembangkan keterampilan yang dimiliki guna menunjang peningkatan keuangan. Setidaknya dengan masih memiliki pasangan (*mean* 1.92, *SD* 0.268) maka bisa membantu suaminya yang berprofesi sebagai pedagang.

Temuan atas kondisi kesejahteraan rumah tangga dijelaskan di bawah ini sesuai dengan sub-kesejahteraan (kesejahteraan subjektif, kesejahteraan inti dan kesejahteraan pendukung). Tabel 3 menyajikan statistik rata-rata nilai ukuran kesejahteraan melalui *nested spheres of poverty* penerima manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan lingkup subjektif, *core* (kesehatan, pendidikan dan standar hidup), dan *context* (alam, ekonomi, sosial, politik dan layanan dan infrastruktur). Penentuan kesejahteraan

rumah tangga menggunakan tiga dari hasil per kuartil untuk membaca indikasi, yaitu kritis, moderat dan baik kondisi kesejahteraan.

Tabel 2. Statistik Profil Penerima Manfaat

	Pendapatan	Jumlah Anak	Jumlah Anak Sekolah	Jumlah KK	Usia Resp.	Pekerjaan Pasangan	Pendidikan	Status Kawin
Responden	343	343	343	343	343	343	343	343
Mean	2.20	2.75	1.65	1.50	2.55	2.29	2.70	1.92
SD	1.328	.890	.739	.779	.715	.822	.832	.268

Sumber: data deskriptif, diolah oleh penulis

Tabel 3. Statistik NESP Penerima Manfaat

	Subjektif	Core			Context				
		Kesehatan	Pendidikan	St_Hidup	Alam	Ekonomi	Sosial	Politik	Infras_La_y
N	Valid	343	343	343	343	343	343	343	343
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		52.62	69.51	89.41	58.99	88.44	63.44	75.32	61.22
Std. Error of Mean		1.40	0.80	1.23	0.85	1.15	0.94	1.01	0.92
Median		50.00	66.67	100.00	59.26	100.00	38.89	62.96	75.00
Std. Deviation		25.88	14.76	22.83	15.71	21.31	17.33	18.74	17.09
Variance		669.68	217.92	521.01	246.89	453.92	300.17	351.22	291.90
Skewness		0.19	-0.06	-2.08	-0.14	-1.64	0.66	0.08	-0.47
Std. Error of Skewness		0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
Kurtosis		-0.77	0.07	3.28	0.11	1.35	0.42	-0.45	-0.19
Std. Error of Kurtosis		0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Range		100.00	80.95	100.00	88.89	66.67	94.44	88.89	87.50
Minimum		0.00	19.05	0.00	11.11	33.33	5.56	11.11	12.50
Maximum		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Percentiles	25	33.33	61.90	100.00	48.15	66.67	33.33	48.15	62.50
	50	50.00	66.67	100.00	59.26	100.00	38.89	62.96	75.00
	75	75.00	80.95	100.00	70.37	100.00	55.56	77.78	87.50

Sumber: data deskriptif, diolah oleh penulis

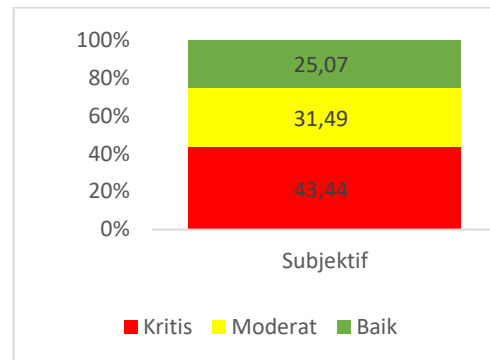
### Kesejahteraan Subjektif

Penghitungan *nested spheres of poverty* untuk mengetahui ukuran kondisi

subjektif dari skor rata-rata indeks yang diperoleh. Berdasarkan jumlah rumah tangga, penerima manfaat yang masuk

kondisi kritis sebanyak 43.44 persen, sebanyak 25.07 persen berada dalam kondisi baik, dan sebanyak 31.49 persen masuk dalam kondisi moderat (gambar 4). Temuan ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga kondisi responden merasa kondisi subjektifnya kritis di tengah pandemik. Akan tetapi secara rata-rata, kondisi kesejahteraan subjektif responden masuk dalam kondisi moderat (*mean* 52.62, *SD* 25.88, *min* 0.00, *median* 50.00, *max* 100.00).

Hasil ukur mengindikasikan adanya subjektifitas keluarga penerima manfaat atas tingkat kualitas individu dari situasi kehidupan di tempat mereka tinggal yang berbeda dalam kesejahteraan. Ketimpangan nilai skor subjektif tiap penerima manfaat dibentuk berdasar pada persepsi mereka. Artinya subjektif penerima manfaat yang berada di daerah mereka tinggal dapat ditentukan dari beberapa faktor yang mampu memberikan penilaian kepada dirinya sendiri seperti kondisi kesehatan, pendidikan, demografi (Cramer et al., 2004) rumah tangga, faktor personal dan pengalaman (Camfield & Skevington, 2008). Ini senada dengan hasil asosiasi faktor-faktor kesejahteraan yang membentuk subjektifitas penerima BTB di Kecamatan Babakan Ciparay (Ismail et al., 2022).

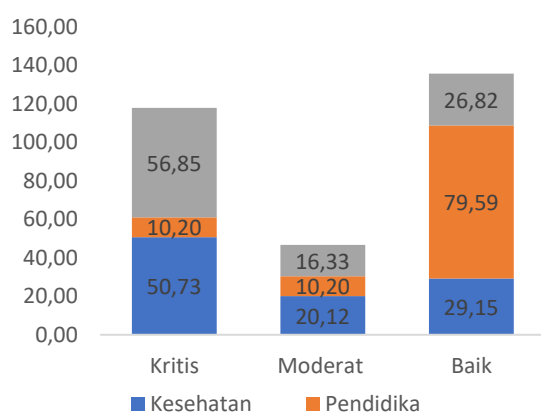


Gambar 4. Persentase Kondisi Kritis, Moderat dan Baik Subjektif Penerima Manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay

### Komponen Dasar (Core)

Pendekatan kemiskinan tidak hanya melalui analisis moneter tentang mengukur kemampuan daya beli, pendapatan atau pengeluaran namun ada lebih luas kepada dimensi lain (Budiantoro et al., 2013) seperti pendidikan, kesehatan dan standar hidup (Alkire et al., 2021). Apabila masyarakat tidak bisa mengakses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, kualitas hidup dari standar kehidupan maka itu bisa dikatakan miskin (Budiantoro et al., 2013). Rumah tangga yang memiliki kondisi keterbatasan pada kebutuhan dasar berdampak pada kondisi kesejahteraan psikologis (Rukumnuaykit, 2015) seperti keterbatasan lahan yang terpaksa tinggal satu rumah dengan keluarga lain, meskipun secara aset mereka yang tinggal di perkotaan terpenuhi dalam menunjang kehidupannya. Pengukuran kemiskinan multidimensi menurut

OPHI dan UNDP, memandang bahwa kemiskinan lebih holistik dan mendalam dalam permasalahan kesehatan, pendidikan dan kualitas kehidupan.



Gambar 5. Persentase Kondisi Kritis, Moderat, dan Baik Pada Komponen Dasar (Core) Per Rumah Tangga Penerima Manfaat PKH

Berdasar persentase jumlah keluarga penerima manfaat (gambar 5), menunjukkan perbandingan kondisi antar komponen/kebutuhan dasar. Kondisi standar hidup penerima manfaat lebih dari setengah penduduk penerima manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay masuk dalam kondisi kritis (56.85%), meskipun ada 26.82 persen masuk dalam kondisi baik dan 16.33 persen dalam kondisi moderat 16.33 persen. Hal yang sama terjadi pada kesehatan yang memiliki grafik menyerupai standar hidup. Ada 50.73 persen rumah tangga penerima manfaat dalam kondisi kritis dan 20.12 persen

masuk dalam kondisi moderat serta 29.15 persen masuk dalam kondisi baik. Namun, skor rata-rata menunjukkan hal lain (kesehatan: *mean* 69.51, *SD* 22.83, *min* 0.00, *median* 66.67, *max* 100.00, standar hidup: *mean* 58.99, *SD* 15.71, *min* 11.11, *median* 59.26, *max* 100.00, tabel 1). Sementara, pendidikan justru memiliki jumlah persentase yang lebih tinggi ketimbang standar hidup dan kesehatan. Pendidikan bagi penerima manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay menunjukkan keberagaman nilai persentase pada kondisi moderat dan kritis, yakni masing-masing 10.20 persen dan jauh lebih rendah dari standar hidup dan kesehatan, sementara sebanyak 79.59 persen masuk kondisi baik. Hal ini ditunjukkan dengan data statistik *mean* 89.41, *SD* 22.83, *min* 00.00, *median* 100, *max* 100.00).

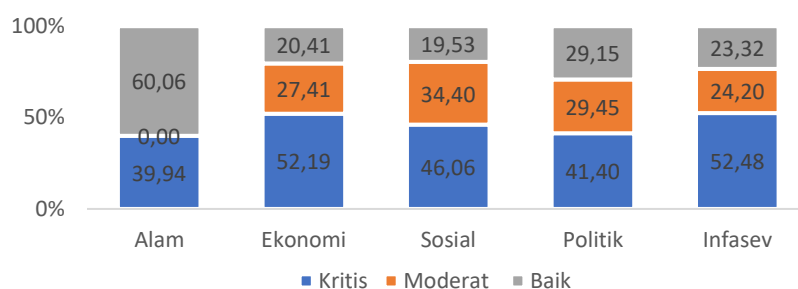
### Lingkup Kesejahteraan (Spheres Welfare)

Model NESP menawarkan hubungan yang jelas dengan berbagai sektor pemerintah dalam mendukung upaya mandiri untuk keluar dari kemiskinan bagi masyarakat miskin. Bahwa peluang kondisi alam, keuangan/ekonomi, fisik, sosial dan layanan mampu meningkatkan peluang penghidupan dan menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut berhubungan satu sama lain untuk mendapatkan mata

pencaharian berkelanjutan (Gonner et al., 2007; Serrat, 2017) dan membantu dalam menentukan prospek dalam mencapai standar kesejahteraan yang lebih tinggi serta dapat memandu dukungan strategis untuk di daerah (Gonner et al., 2007). Namun jika dalam lingkup kesejahteraan kurang mendukung hal itu dapat menyebabkan deprivasi kesejahteraan.

Gambar 6 menunjukkan jumlah persentase rumah tangga dalam lingkup kesejahteraan di Kecamatan Babakan Ciparay. Sebagaimana dalam skor

penghitungan dari masing-masing rumah tangga penerima manfaat, lingkup kesejahteraan di Kecamatan Babakan Ciparay menunjukkan (gambar 4) lebih dari sebagian rumah tangga menganggap alamnya dalam kondisi baik (60.06%). Sementara ke lima lingkup kesejahteraan ekonomi (52.19%), sosial (46.06%), politik (41.40%), infrastruktur dan layanan (52.48) masuk dalam kondisi kritis atau mendominasi dari tiap ke lima lingkup kesejahteraan.



Gambar 6. Persentase Kondisi Kritis, Moderat dan Baik Lingkup Kesejahteraan (Context) di Kecamatan Babakan Ciparay

Lingkup alam (mutu air, tanah dan udara) di Kecamatan Babakan Ciparay dirasakan oleh penerima manfaat dengan kondisi baik (60.06) meskipun 39.94 persen dalam kondisi kritis (*mean 88.44, SD 21.31, min 33.33, median 100.00, max 100.00*). Hal yang sama terjadi di lingkup ekonomi bahwa ada 20.41 persen penerima manfaat mendapatkan peluang kerja, mampu menabung, pengeluaran, dapat bantuan dari

pemerintah pusat/daerah dan memiliki pinjaman (*mean 44.35, SD 17.33, min 5.56, median 38.89, max 100*). Artinya, mereka dapat menyalurkan uang untuk menabung dan mereka masih mendapatkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, meskipun sebanyak 27.41 persen penerima manfaat dalam kondisi moderat dan 52.19 persen mengalami kondisi ekonomi kritis. Sementara

ketersediaan infrastruktur dan ruang/layanan public, yakni mutu layanan kesehatan/pendidikan, ketersediaan ruang publik, keterbatasan akses perolehan barang dan jasa hanya 23.32 persen dirasakan oleh penerima manfaat meskipun hampir setengah rumah tangga (52.48 persen) menunjukkan kondisi kritis atau belum diselenggarakan oleh penerima manfaat (*mean* 61.22, *SD* 17.70, *min* 6.06, *median* 60.61, *max* 100.00). Dalam hal politik (*mean* 75.32, *SD* 17.09, *min* 12.50, *median* 75.00, *max* 100.00), terdapat hal yang sama, yakni 19.53 persen penerima manfaat mendapatkan kondisi baik dalam kemudahan akses informasi, partisipasi dengan masyarakat/keluarga dan kesetaraan hak sebagai masyarakat di tempat tinggalnya namun terdapat 52.19 persen menunjukkan kritis dan 27.41 moderat. Kemudian, di aspek sosial menunjukkan 46.06 persen menandakan adanya kondisi kritis dalam hal kepercayaan bermasyarakat, keamanan, toleransi dan partisipasi bermasyarakat.

### **Kesejahteraan Rumah Tangga Penerima Manfaat Di Perkotaan**

Temuan studi ini membuat kontribusi untuk melengkapi literatur sekarang, yaitu melakukan resertifikasi guna memenuhi prasyarat kondisionalitas keluarga penerima

manfaat (Puteri, 2021; Rossel et al., 2019) untuk mengidentifikasi ukuran kesejahteraan penerima bantuan guna meningkatkan kesejahteraan. Pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan secara holistik dilihat dari moneter dan non-moneter. Melihat konsep tersebut, kesejahteraan penerima bantuan di perkotaan, Kecamatan Babakan Ciparay, rata-rata mengalami deprivasi kesejahteraan.

Deprivasi kesejahteraan penerima bantuan memiliki dua penyebab. Pertama melihat dari hasil rata-rata indeks kesejahteraan (tabel 3) lebih dominan kondisi kritis di tiap indikatornya. Bahwa hasil analisis dari hasil ukur indeks kesejahteraan rata-rata dengan model *nested spheres of poverty* (NESP) menunjukkan lingkup kesejahteraan ekonomi, sosial, politik dan infrastruktur & layanan masuk dalam keadaan kritis, dibandingkan kondisi alam dalam kondisi baik. Kondisi ini mengarah kepada penerima bantuan mengalami keterbatasan dalam mengakses. Misal lingkup ekonomi, mereka belum memaksimalkan membeli barang, menabung, melakukan usaha dan kemudahan mencari kerja. Lingkup sosial, penerima manfaat masih kurang dalam melakukan kegiatan dan dukungan sosial. Lingkup politik masih kurang dalam mengambil

sikap seperti memutuskan sesuatu, menentukan pilihan, dan menyelesaikan baik di internal maupun eksternal. Lingkup layanan dan ketersediaan infrastruktur penerima bantuan masih kurang merasakan meskipun beberapa layanan mereka merasa menerima layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan publik (pemerintah). Lingkup kesejahteraan ini menggambarkan keterkaitan dalam masing-masing indikator. Padahal, hubungan institusi dengan masyarakat merupakan partisipasi dalam mengambil kebijakan. Misalnya orang yang kurang beruntung secara sosial lebih mungkin terpapar jaringan sosial dan dukungan sosial yang buruk (Weyers et al., 2008).

Kesejahteraan inti (kemiskinan dimensi) dua indikator kesehatan dan standar hidup masuk dalam kondisi kritis. Kritisnya kesehatan penerima manfaat dikaitkan dengan pola kesehatan dan pemenuhan gizi misalnya pemenuhan nutrisi. Mereka hanya cukup memenuhi kebutuhan makan tanpa melihat seberapa baik kandungan nutrisi. Adapun, pendidikan memberikan kondisi baik mengingat mereka menyekolahkan anak mereka. Hasil indeks kesejahteraan subjektif terlihat berbeda dari faktor kesejahteraan lainnya. Rata-

rata persepsi penerima bantuan menilai kondisi hidup mereka merasa puas saat ini meskipun melihat jumlah terdapat 43.44% dalam kondisi kritis. Saat ini, penilaian kemiskinan multidimensi dapat digunakan untuk intervensi dalam target dan pengawasan rumah tangga (Alkire et al., 2015; Wietzke, 2015). Beberapa alasan ini menangkap dinamika jangka panjang dalam kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga dan kebutuhan praktis untuk melakukan penargetan dan pemantauan intervensi dalam dimensi yang berbeda (Wietzke, 2015).

Kedua, rata-rata demografi rumah tangga penerima bantuan masih di bawah garis kemiskinan perkotaan yang menunjukkan penghasilan di bawah satu juta (*mean* 2.20, *SD* 1.328), garis kemiskinan di Kota Bandung 428.832 (tabel 1). Ukuran rumah tangga mempunyai asosiasi dengan kemiskinan. Faktor pendorong kemiskinan berasal dari determinan kemiskinan di tingkat rumah tangga karena mendorong dalam meningkatkan pendapatan seperti: umur, ukuran rumah tangga, pendidikan, etnis, status pekerjaan, status perkawinan, sektor kehidupan, sifat cacat kepala rumah tangga, memiliki lahan dan menerima remitansi (Ravindra Deyshappriya &

Minuwanthi, 2020). Adapun ukuran keluarga di perkotaan dapat membentuk kualitas hidup secara subjektif (Diener et al., 1993; Kittiprapas, 2009; Lehman et al., 1995). Oleh karena, ukuran keluarga penerima bantuan di Kecamatan Babakan Ciparay dapat mengalami kualitas hidup yang rendah, seperti mereka masih hidup bersama dengan kepala keluarga lain dalam satu rumah, memiliki anak di atas dua, usia yang produktif namun memiliki pendidikan rendah.

Secara moneter, demografi penerima bantuan dapat memberikan pengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga. Kemiskinan keluarga dapat disebabkan faktor internal seperti penghasilan (Hayati & Syafrida Nasution, 2020). Sering kali, orang yang memiliki penghasilan rendah sulit melakukan investasi karena kapasitas tabungan yang rendah dan akses kredit yang sulit (Rossel et al., 2019). Berkenaan dengan kebutuhan pokok, penduduk perkotaan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan akibat kenaikan harga beras bagi mereka yang tinggal di luar produsen beras (Badolo & Traoré, 2015). Jika penghasilan penerima bantuan rendah dan mengalami kenaikan pada kebutuhan pokok, ada penundaan pemenuhan kebutuhan penting lainnya

demi mewujudkan kebutuhan primer (*opportunity cost*). Rumah tangga yang dikepalai perempuan program BTB tidak selalu cukup mengatasi kemiskinan awal. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih mungkin berada dalam kemiskinan ketimbang dikepalai oleh laki-laki (Pukuh & Widyasthika, 2018) maka penerima bantuan berstatus janda (8%) menghadapi kesulitan yang sama. Meskipun kondisi tersebut menjadi berbeda apabila penerima manfaat mempunyai pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan penerima bantuan masih memanfaatkan bantuan yang diterima (Rubio-Sanchez et al., 2021). Selain itu, ibu yang kurang berpendidikan biasanya menghadapi kendala keuangan yang lebih besar dan keputusan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi jauh lebih sensitif daripada keputusan mengenai sekolah dasar (Feng, 2021) terutama bagi penerima manfaat sudah menjadi *single parent*.

Pengukuran indeks kesejahteraan melalui NESP dilakukan secara mandiri atau berdiri sendiri di tiap indikator. Terkait faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan telah diketahui. Namun, studi



ini belum melihat asosiasi atau yang mempengaruhi satu sama lain dari dampak program. Namun, jika melihat asosiasi faktor kesejahteraan dengan subjektifitas penerima bantuan di Kecamatan Babakan Ciparay menunjukkan berbeda. Ada asosiasi faktor kesejahteraan yang membentuk subjektifitas penerima BTB (*conditional cash transfer*) di Kecamatan Babakan Ciparay (Ismail et al., 2022). Hal yang sama dalam temuan program bantuan tunai, khususnya bantuan tanpa syarat (*unconditional cash transfer*) yang menyimpulkan bahwa dampak program bantuan tunai belum meningkatkan kesejahteraan subjektif, namun dampak program tersebut memberikan kepuasan pada penerima bantuan (Khomaini, 2020). Namun temuan penelitian ini dengan melakukan ukur kesejahteraan subjektif menunjukkan kondisi baik.

Secara umum, subjektif mendapatkan dampak dari non moneter dalam hal kesejahteraan inti dan lingkup kesejahteraan, walaupun hasilnya akan berbeda di tiap indikator yang digunakan. Sebagaimana kondisi subjektif penerima bantuan dalam kondisi baik namun kualitas atau kepuasan hidup dapat berubah jika dihadapkan pada perubahan kondisi ekonomi (pendapatan, kemiskinan,

dependensi), layanan pendidikan, kondisi lingkungan, layanan kesehatan, keamanan publik, kondisi sosial (Muhammed & Abubakar, 2020), psikologis dan material yang dialami oleh masyarakat miskin berkontribusi pada status kesehatan (Camfield & Skevington, 2008). Hal ini dapat terjadi jika dihadapkan pada situasi wabah penyakit, seperti wabah COVID-19, kehilangan pekerjaan, dan lainnya yang mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat miskin atau rentan.

Individu/keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dapat dikaitkan dengan kurangnya dukungan sumber daya di daerah sehingga dapat mempengaruhi subjektif. Apalagi penerima BTB merupakan keluarga miskin yang berada di desil terendah tingkat kesejahteraannya. Semakin parah jika penerima bantuan tinggal di perkotaan dihadapkan dengan karakteristik daerah itu sendiri. Untuk membantu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup dibutuhkan modal manusia, sosial, alam, fisik, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai bagi penerima bantuan dan meningkatkan keterampilan guna memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan melalui *sustainable livelihood*. Strategi

*sustainable livelihood* untuk menghindari kerentanan, dan keputusan kebijakan (Serrat, 2017) karena keputusan dalam menilai atau mengukur kemiskinan/kesejahteraan melihat dari segala dimensi.

Ukuran kesejahteraan dengan melihat aspek moneter dan non moneter dapat menjawab bagaimana kerentanan penerima bantuan melalui NESP terlihat. Selain mengidentifikasi faktor kesejahteraan, dapat dilakukan dalam proses penerapan persyaratan BTB. Persyaratan dapat meningkatkan kerentanan penerima karena implikasi kebijakan (Rossel et al., 2019). Dalam pengertian ini, dikhawatirkan dari dampak kebijakan yang ada dapat menyampingkan kualitas layanan yang buruk bagi penerima bantuan sehingga membuat mereka lebih rentan. Oleh karena itu, menegaskan bahwa konteks pelaksanaan BTB melihat hambatan teritorial dan jarak geografis (Nieto-Aleman et al., 2019). Singkatnya, jika program BTB memperkenalkan persyaratan dalam memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan maka meningkatkan kualitas pelaksanaan BTB tanpa menyampingkan yang sudah ada. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan persyaratan dapat memberikan ruang untuk kesalahan

informasi dan kebijaksanaan di pihak aktor lokal, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penerimaan penerima bantuan. BTB telah membuktikan manfaat bagi masyarakat miskin dan telah menjadi alat yang tepat waktu pandemi COVID-19 (Braun & Ikeda, 2020).

Akhirnya, ukuran kesejahteraan dan ukuran keluarga dapat diketahui. Sistem pemantauan kemiskinan regional/lokal dengan mendekati moneter dan non-moneter dalam BTB memberikan informasi yang komprehensif dan relevan untuk perencanaan tingkat regional hingga kecamatan (Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, de Jong, et al., 2007). Ini dilakukan untuk memotret kemiskinan regional. Kemiskinan regional terjadi dalam keadaan yang sangat berbeda, seperti kelangkaan sumber daya, konflik, kebebasan memilih, dan ketidaksetaraan. (Nieto-Aleman et al., 2019). Informasi tentang komponen dasar (pendidikan, kesehatan dan standar hidup) dan lingkup kesejahteraan (*spheres welfare*) dapat membantu dalam perencanaan ditingkat provinsi/kabupaten. Ini untuk mengetahui titik-titik kemiskinan supaya dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk rumah tangga yang mengalami kemiskinan akut (kebutuhan

dasar), antisipasi kemiskinan yang tidak didukung oleh lingkup kesejahteraan, identifikasi strategis dalam mengurangi kemiskinan kronis dan mampu mengidentifikasi area prioritas untuk pembangunan yang lebih merata dan melacak perubahan data kemiskinan dari waktu ke waktu. Sementara itu, studi ini hanya mengukur kesejahteraan sehingga mempunyai keterbatasan dalam melihat dampak dari program. Oleh karena itu, perlu mendekatkan konsep yang sama untuk penelitian ke depan agar lebih baik.

## KESIMPULAN

Studi ini melengkapi literatur kesejahteraan yang menggunakan analisis deskriptif dalam mengukur kesejahteraan penerima BTB di perkotaan. Melalui pengukuran dengan menggunakan indeks kesejahteraan *nested spheres of poverty* untuk menentukan kondisi penghambat/kelemahan penerima manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara rerata indeks subjektifitas penerima bantuan masih optimis dengan kondisi kesejahteraan sekarang, meskipun secara jumlah rumah tangga mengalami kritis. Sementara lingkup multidimensi dan lingkup pendukungnya mengarah

ke deprivasi kesejahteraan bagi penerima bantuan yang notabene ukuran keluarga penerima bantuan masih di bawah garis kemiskinan. Sampai saat ini BTB telah menambah pendapatan mereka dalam mengakses kesehatan dan pendidikan. Namun struktur BTB saat ini menawarkan kemungkinan untuk membuat kesenjangan di kalangan masyarakat menciptakan ketimpangan di kalangan miskin karena ketimpangan akan semakin parah jika yang termiskin kurang mendapatkan manfaat dari program. Jika ini dihadapkan pada penerima aktif maka mereka yang tinggal di perkotaan dan memiliki kesejahteraan di kuantil terendah serta memiliki penghasilan rendah dapat mengalami *opportunity cost* dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebab, hasil studi menunjukkan kondisi demografi penerima bantuan masih di bawah garis kemiskinan. Adapun bagi eks penerima bantuan dapat kembali memparah pada kemiskinan multidimensi (kesehatan dan standar hidup).

Pentingnya program BTB dalam mengentas kemiskinan untuk generasi anak, alternatif kebijakan untuk masalah tersebut dengan resertifikasi guna memenuhi prasyarat kondisionalitas keluarga penerima

manfaat. Pemerintah pusat/daerah perlu preferensi ukuran kesejahteraan kembali dalam penentuan target sasaran calon penerima, pemantauan pelaksanaan dan *exit* program melalui pendekatan moneter dan non moneter. Sebab, hal ini dapat dilihat faktor-faktor yang menghambat dalam meningkatkan kesejahteraan penerima BTB. Misalnya memperluas konvergensi program bantuan kepada penerima BTB dan mengoptimalkan asistensi sosial untuk meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan dan kondisi sosial ekonomi melalui keterampilan sebagai upaya dasar memenuhi standar hidup yang layak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alatartseva, E., & Barysheva, G. (2015). *Well-being: Subjective and Objective Aspects*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 166, 36–42. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.479>
- Alkire, S. (2015). *The Capability Approach and Well-Being Measurement for Public Policy*. In *OPHI Working Paper 94 (Issue November 2019)*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199325818.013.18>
- Alkire, S., Foster, J., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M., & Ballón, P. (2015). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis*. In *Oxford University Press (First, Vol. 11, Issue 3)*. *Oxford University Press*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199689491.001.0001>
- Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, N. (2021). *Global multidimensional poverty and COVID-19: A decade of progress at risk? Social Science and Medicine*, 291. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114457>
- Azevedo, V., & Robles, M. (2013). *Multidimensional Targeting: Identifying Beneficiaries of Conditional Cash Transfer Programs*. *Social Indicators Research*, 112(2), 447–475. <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0255-5>
- Badolo, F., & Traoré, F. (2015). *Impact of rising world rice prices on poverty and inequality in Burkina Faso*. *Development Policy Review*, 33(2), 221–244. <https://doi.org/10.1111/dpr.12099>
- Behrman, J. R., Gallardo-García, J., Parker, S. W., Todd, P. E., & Vélez-Grajales, V. (2012). *Are conditional cash transfers effective in urban areas? Evidence from Mexico*.

- Education Economics*, 20(3), 233–259.  
<https://doi.org/10.1080/09645292.2012.672792>
- BPS. Gini Ratio Provinsi 2022-2020 *webiste*  
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26%2000:00:00/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2018.html>
- BPS. Garis Kemiskinan (Rupiahj/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022 *website*  
<https://www.bps.go.id/indicator/23/195/1/garis-kemiskinan-menurut-provinsi.html>
- BPS. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022 *website*  
<https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Braun, R. A., & Ikeda, D. (2020). *Why Cash Transfers Are Good Policy in the COVID-19 Pandemic*. *Federal Reserve Bank of Atlanta, Policy Hub*, 04.  
<https://doi.org/10.29338/ph2020-04>
- Budiantoro, S., Fanggidae, V., Saputra, W., Maftuchan, A., & Artha, D. (2013). *Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. In PRAKARSA *Economic Policy Working Paper*.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). *Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia*. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Cahyat, A., Gönner, C., & Haug, M. (2007). *Assessing Household Poverty and Wellbeing – A Manual with Examples from Kutai Barat, Indonesia*. *Center for International Forestry Research*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.17528/cifor/002265>
- Camfield, L., & Skevington, S. M. (2008). *On subjective well-being and quality of life*. *Journal of Health Psychology*, 13(6), 764–775.  
<https://doi.org/10.1177/1359105308093860>
- Chiappori, P. (2016). *Welfare and the Household*. *March 2018*, 1–25.  
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199325818.013.26>
- Chiappori, P. A., & Meghir, C. M. (2014). *INTRA-HOUSEHOLD WELFARE*. In *NBER Working*

- Papers 20189, National Bureau of Economic Research, Inc. (Vol. 39, Issue 20189). <http://www.nber.org/papers/w20189.pdf>*
- Cummins, R. A. (2018). *Subjective Wellbeing as a Social Indicator. Social Indicators Research, 135(3), 879–891. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1496-x>*
- Data Kota Bandung. *Website Indeks Survey Skor Kecamatan di Kota Bandung: <http://data.bandung.go.id/dashboard/indeks-survey/skor-kecamatan> di akses 18 Juni 2022*
- Diener, E. (1984). *Subjective Well-being. In Psychological Bulletin (Vol. 95, Issue 3, pp. 542–575). American Psychological Association, Inc.*
- Diener, E., & Ryan, K. (2015). *Subjective well-being: a general overview. 39(4), 391–406.*
- Diener, E., Sandvik, E., Seidlitz, L., & Diener, M. (1993). *The Relationship Between Income and Subjective Well-being Relative or Absolute? Social Indicators Research, 28, 195–223.*
- Dolan, P., Layard, R., & Metcalfe, R. (2011). *Measuring subjective well-being for public policy. February. <http://www.statistics.gov.uk/>*
- Etikan, I., & Babatope, O. (2019). *A Basic Approach in Sampling Methodology and Sample Size Calculation. Med Life Clin, 1(1006), 50–54.*
- Feng, N. (2021). *The Effect of Sibling Size on Childrens Educational Attainment: Evidence From Indonesia. ECNU Review of Education, 4(4), 830–856. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/209653112092170>*
- Gonner, C., Haug, M., Cahyat, Wollenberg, de Jong, W., Limberg, G., Cronkleton, P., Moeliono, M., & Becker. (2007). *Capturing nested spheres of poverty: a model for multidimensional poverty analysis and monitoring. Capturing Nested Spheres of Poverty: A Model for Multidimensional Poverty Analysis and Monitoring. <https://doi.org/10.17528/cifor/002255>*
- Hadna, A. H., & Askar, M. W. (2022). *The Impact of Conditional Cash Transfers on Low-Income Individuals in Indonesia. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 15(1), 23–42. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0067>*
- Hastuti, Ruhmaniyati, & Widyaningsih, D. (2020). *Pelaksanaan PKH dan*

- Program Sembako dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19. In Catatan Penelitian SMERU (Issue 2).*
- Hayati, H., & Syafrida Nasution, E. (2020). *Influencing Factors to the Family Welfare in Mulyasejati Village Towards Citarum Harum. KnE Social Sciences, 2020, 194–205.* <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7873>
- Ismail, T., Dwiputranti, S., & Nurliawati, N. (2022). *Faktor Kesejahteraan Objektif Dalam Subjektifitas Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Wilayah Perkotaan. Jurnal Media Administrasi Terapan, 03(2), 158–167.* <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jmat.v3i2.63>
- Kalama, K. K., Hoqueb, M. K. A., & Jahanc, W. (2021). *Ichrd 2021. April.* [https://www.researchgate.net/profile/Khaled-Kalam-2/publication/351578708\\_INTERNATIONAL\\_SEMINAR\\_ON\\_HUMAN\\_RESOURCE\\_DEVELOPMENT\\_ICHRD\\_2021\\_ICHRD\\_2021\\_Analysis\\_of\\_Financial\\_Performance\\_and\\_Corporate\\_Sustainability\\_Performance\\_Linkage\\_Evidence\\_from\\_the\\_Bankin](https://www.researchgate.net/profile/Khaled-Kalam-2/publication/351578708_INTERNATIONAL_SEMINAR_ON_HUMAN_RESOURCE_DEVELOPMENT_ICHRD_2021_ICHRD_2021_Analysis_of_Financial_Performance_and_Corporate_Sustainability_Performance_Linkage_Evidence_from_the_Bankin)
- Kementrian Sosial. *Sebaran KPM dan SDM PKH di Indonesia. Website* <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=dashome>
- Khomaini, A. A. (2020). *Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) terhadap Kesejahteraan Subyektif di Indonesia. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(1), 1–16.* <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.161>
- Kittiprapas, S. (2009). *Subjective-well-being: New paradigm for measuring progress and public policies. 3rd OECD World Forum.*
- Kuhumab, S. K. (2018). *Amartya Sen's Capability Approach as theoretical foundation of human development. Journal of Sociology and Development, 1(March), 128–134.*
- Lehman, A. F., Rachuba, L. T., & Postrado, L. T. (1995). *Demographic influences on quality of life among persons with chronic mental illnesses. Evaluation and Program Planning, 18(2), 155–164.* [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(95\)00006-W](https://doi.org/10.1016/0149-7189(95)00006-W)
- Levine, S., Batana, J., Muwonge, & Maweki, Y. (2012). *OPHI WORKING PAPER NO . 55 A Robust Multidimensional Poverty*

- Profile for Uganda. In Oxford Poverty and Human Development Initiative.* <http://ophi.qeh.ox.ac.uk/>
- Martínez, D. M., & Maia, A. G. (2018). *The Impacts of Cash Transfers on Subjective Wellbeing and Poverty: The Case of Colombia.* *Journal of Family and Economic Issues*, 39(4), 616–633. <https://doi.org/10.1007/s10834-018-9585-4>
- McGuire, J., Kaiser, C., & Bach-Mortensen, A. M. (2022). *A systematic review and meta-analysis of the impact of cash transfers on subjective well-being and mental health in low- and middle-income countries.* *Nature Human Behaviour*, 6(3), 359–370. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01252-z>
- Muhammed, Z., & Abubakar, I. R. (2020). *Improving the Quality of Life of Urban Communities in Developing Countries.* January, 357–370. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95726-5\\_25](https://doi.org/10.1007/978-3-319-95726-5_25)
- Nieto-Aleman, P. A., Garcia-Alvarez-Coque, J. M., Roig-Tierno, N., & Mas-Verdú, F. (2019). *Factors of regional poverty reduction in Colombia: Do institutional conditions matter? Social Policy and Administration*, 53(7), 1045–1063. <https://doi.org/10.1111/spol.12474>
- Nugroho, T. W., Hanani, N., Toiba, H., & Sujarwo, S. (2022). *Promoting Subjective Well-Being among Rural and Urban Residents in Indonesia: Does Social Capital Matter? Sustainability (Switzerland)*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/su14042375>
- Pukuh, N., & Widyasthika, H. F. (2018). *Women Left Behind? Findings from Female Headed Household in Indonesia.* *International Conference and Workshop on Gender, October*, 397–410.
- Puteri, G. C. (2021). *The Importance Of Strengthening Mechanism And Instruments For Resertification/Graduation Of Family Hope Program Beneficiaries.* *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 3(2), 41–46. <https://doi.org/10.7454/Jsht.V3i2.140>
- Ravindra Deyshappriya, N. ., & Minuwanthi, R. W. W. . (2020). *Determinants of Poverty: Is Age Non-Linearly Related with Poverty? Evidence from Sri Lanka.* *International Journal of Asian Social Science*, 10(4), 181–192. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2020.104.181.192>



- Rojas, M. (2014). *Well-being and the Complexity of Poverty: A Subjective Well-being Approach*. January.
- Rossel, C., Courtoisie, D., & Marsiglia, M. (2019). *How could conditional cash transfer programme conditionalities reinforce vulnerability? Non-compliers and policy implementation gaps in Uruguay's Family Allowances*. *Development Policy Review*, 37(1), 3–18.  
<https://doi.org/10.1111/dpr.12327>
- Rubio-Sanchez, Y. Y., Rodríguez-Juárez, E., & Polo Jiménez, S. D. (2021). *Effect of Conditional Cash Transfer Programs When the Head of the Household Is Female in Mexico*. *Journal of International Women's Studies*, 22(3), 3–12.
- Rukumnuaykit, P. (2015). *Urbanisation, Poverty and Subjective Well-Being: Empirical Evidence from Thailand*. *Urban Policy and Research*, 33(1), 98–118.  
<https://doi.org/10.1080/08111146.2014.980901>
- Sembiring, R. K. (2022). *Analysis of Non Poor Households Have Received Conditional Cash Transfer*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 563–575.  
<https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.316>
- Serrat, O. (2017). *Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance*. *Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance*, 1–1140. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9>
- Su, F., Song, N., Ma, N., Sultanaliev, A., Ma, J., Xue, B., & Fahad, S. (2021). *An assessment of poverty alleviation measures and sustainable livelihood capability of farm households in rural china: A sustainable livelihood approach*. *Agriculture (Switzerland)*, 11(12).  
<https://doi.org/10.3390/agriculture11121230>
- Syamsulhakim, E., & Khadijah, N. (2021). *Graduating from a Conditional Cash Transfer Program in Indonesia*. In *Graduating from a Conditional Cash Transfer Program in Indonesia*.  
<https://doi.org/10.1596/36784>
- Taherdoost, H. (2020). *Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research Hamed Taherdoost To cite this version : HAL Id : hal-02546796* *Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for. International Journal of Academic*

*Research in Management (IJARM),*  
5(2296–1747), 18–27.

Takeshi, A. (2018). *Subjective Well-Being and Objective Poverty Indices: Evidence from Panel Data in South Africa* Takeshi Aida. 1–6.

Thaariq, R. M., Wahyu, M. F. R., Ningrum, D. R., & Aidha, C. N. (2020). *Prakarsa Working Paper 01 - Multidimensional Poverty and the Risk of COVID-19 in Indonesia*. Perkumpulan PRAKARSA.

Weyers, S., Dragano, N., Möbus, S., Beck, E. M., Stang, A., Möhlenkamp, S., Jöckel, K. H., Erbel, R., & Siegrist, J. (2008). *Low socio-economic position is associated with poor social networks and social support: Results from the Heinz Nixdorf Recall Study*. *International Journal for Equity in Health*, 7, 1–7. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-7-13>

Wietzke, F.-B. (2015). *Who is poorest? An asset-based analysis of multidimensional wellbeing*. *Development Policy Review*, 33(1), 33–59. <https://doi.org/10.1111/dpr.12091>

World Bank. (2011). *Program Keluarga Harapan: Main Findings from the Impact Evaluation of Indonesia's Pilot Household Conditional Cash Transfer Program (Issue June)*.